

## Nelayan Khawatir Tidak Bisa Melaut

**SEMARANG (KR)** - Masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir utara Kota Semarang merasa khawatir dengan pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Mereka khawatir akan terkena dampak dari pembangunan jalan tol tersebut yang diperkirakan bakal rampung tahun ini untuk pembangunan seksi dua. Sekitar 50 nelayan yang tinggal di Kampung Nelayan Terboyo Wetan, Kota Semarang akhirnya mengadu ke FPKS DPRD Jateng, saat Ketua FPKS Agung Budi Margono mengunjungi kampung nelayan tersebut, Kamis (7/4). Agus selaku Ketua Kelompok Rizki Bahari mengaku khawatir pembangunan tol Semarang-Demak akan mengakibatkan muara-muara yang biasa digunakan nelayan untuk melaut tertutup, sehingga tidak dapat dilalui kapal nelayan. Agung Budi Margo kepada wartawan, Minggu (10/4) di Semarang mengatakan, pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat nelayan di pesisir utara Kota Semarang yang terdampak proyek nasional tol Semarang-Demak. Aspirasi tersebut disampaikan oleh masyarakat kampung nelayan saat FPKS DPRD Jateng melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang sekaligus memperingati Hari Nelayan pada tanggal 7 April lalu. Menanggapi keluhan nelayan tersebut, Agus minta kepada pemerintah pusat, Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang untuk merespons keluhan tersebut. Kekhawatiran nelayan tersebut tidak hanya berdampak pada nelayannya saja, tetapi juga berdampak kepada masyarakat nelayan secara komunal dan keluarga nelayan itu sendiri. (Bdi)

## Kota Magelang Memasuki Usia 1116 Tahun

**MAGELANG (KR)** - Hari ini, Semrin (11/4) Kota Magelang memasuki usia 1116 tahun, diperingati secara sederhana dengan rangkaian kegiatan, tanpa mengurangi kekhidmatan. Hal tersebut dibenarkan Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH saat ditemui wartawan usai menghadiri acara pembinaan amal zakat di tingkat Unit Pelaksana Zakat (UPZ) Masjid se Kota Magelang yang dilaksanakan di Pendapa Pengabdian rumah dinas Walikota Magelang, Minggu (10/4). Dengan Ulang Tahun atau Hari Jadi ke-1116 ini ada suatu perubahan sikap, yaitu keguyuban, kerukunan, welas asih sesama dan dermawan dari Kota Magelang semakin meningkat. Dan diharapkan dapat sinergis dalam Hari Jadi ke-1116 Kota Magelang ini. Kegiatan tasyakuran Hari Jadi ke-1116 ini juga dilaksanakan tidak secara terpusat, tetapi dibagi ke setiap kelurahan di wilayah Kota Magelang. (Tha)



Walikota Magelang menyerahkan SK.

KR-Thoha

## Pemkab Dorong Legalitas Pemanfaatan Tanah Negara

**PURWOREJO (KR)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dorong pemanfaatan tanah negara (GG) secara legal oleh masyarakat. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo mulai menerapkan strategi Pemetaan Berbasis citra satelit dan Global Positioning System (Matras Lopolis) tanah negara.

Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo Eko Paskiyanto mengatakan, tanah negara selama ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Purworejo.

Mereka kebanyakan mengelola tanah GG yang terletak di pesisir untuk budidaya perikanan dan pertanian. "Namun, belum semuanya memiliki izin yang bentuknya adalah alas hak tanah negara yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pemerintah daerah," katanya, Minggu

(10/4).

Luas tanah negara yang terdapat di Kabupaten Purworejo mencapai 468 hektare. Tanah tersebut berada di Kecamatan Purwodadi seluas 114 hektare, Ngombol 160,3 hektare, Grabag 173,7 hektare, dan di 13 kecamatan lain 20 hektare. Dari luasan itu, kata Eko, baru 25 bidang tanah dengan luas 14,2 hektare yang memiliki alas hak tanah negara.

Diperkimtan Purworejo juga mendaftarkan adanya permohonan alas hak tanah negara oleh masyarakat. "Pengajuan berdasarkan data tahun 2021, seluas 65 hektare di Purwodadi, Ngombol, Grabag, dan Kutoarjo, tapi belum terealisasi. Padahal tanah GG 468 hektare itu adalah potensi ekonomi Purworejo," tuturnya.

Belum terealisasinya permohonan itu karena dinas masih menunggu terbitnya regulasi yang mengatur permasalahan tersebut. Pem-

kab, katanya, berencana menyusun peraturan bupati terkait izin menggunakan tanah negara sebagai produk turunan perda tata ruang dan wilayah.

Masih banyaknya pemanfaatan tanah negara yang belum dilandasi alas hak, mendorong Dinperkimtan Purworejo membuat terobosan dengan menerapkan strategi Matras Lopolis.

Apabila tidak diselesaikan, kata Eko, ada persoalan laten yang kelak akan dihadapi masyarakat dan pemerintah antara lain semakin sulitnya pengendalian pemanfaatan tanah GG, pemanfaatan tidak sesuai tata ruang, pemerintah semakin sulit menyediakan sarpras pendukung kegiatan usaha produktif, serta terhambatnya layanan bidang pertanahan.

"Maka, kami berkomitmen mendorong penyelesaian potensi masalah itu, yakni dengan strategi Matras Lopolis. Pemetaan dan identifi-

kasi itu jadi salah satu syarat dalam perolehan alas hak atas tanah negara," terangnya.

Menurutnya, setelah adanya alas hak atas tanah negara, akan disusul dengan adanya kerja sama antara masyarakat sebagai pengelola dengan pemerintah daerah. "Nanti sistemnya bagaimana, mau sewa atau

seperti apa, tentu akan diselesaikan bersama," ujarnya.

Selain itu, adanya alas hak juga menjadi jalan bagi pemerintah untuk membangun berbagai sarpras pendukung usaha produktif di tanah GG. Fasilitas tersebut, lanjutnya, akan menjadi pendorong berbagai usaha ekonomi masyarakat di atas tanah negara. (Jas)



KR-Jarot Sarwosambodo

Pemetaan berbasis citra satelit dan GPS oleh petugas Dinperkimtan di atas tanah GG.

## Animo Vaksinasi Masyarakat Meningkat

**SEMARANG (KR)** - Jajaran Polda Jateng memanfaatkan momentum Ramadan meningkatkan intensitas vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Peningkatan dengan melakukan terobosan kreatif agar masyarakat mau divaksin, memanfaatkan momentum yang berkaitan dengan Ramadan mengundang perhatian Kapolda Jateng.

"Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi atas peran masyarakat," ungkap Kapolda Jateng melalui Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy.

Menurut Iqbal, Sabu (9/4) terobosan kreatif agar mau divaksin, seperti dilakukan Polres Klaten. Polres Klaten pada Ramadan memanfaatkan momentum ngabu-

burit dengan membuka gerai vaksinasi di Alun-alun Kota setempat. Kemudian Polrestabes Semarang melaksanakan vaksinasi malam hari yang dilaksanakan di Simpang Lima dan Masjid Besar (Kauman) Semarang. Sementara Polresta Surakarta membuka vaksinasi untuk umum di poliklinik kantor setempat mulai sore hingga tengah malam.

Satu terobosan kreatif lain dice-

tuskan Polres Purworejo. Kapolres AKBP Fahrurrozi memberikan hadiah bagi tiga orang yang beruntung untuk mendapatkan paket umroh melalui Program Vaksinasi Presisi Polres Purworejo. Ketentuan tersebut berlaku bagi mereka yang melakukan vaksin baik dosis 1, 2, maupun 3 selama bulan Ramadan. Berbagai terobosan yang dilakukan Polres jajaran Polda Jawa Tengah itu, tak ayal membuat masyarakat tertarik untuk ikut divaksin.

Iqbal mengatakan jajaran Polda Jateng, sejak lama berupaya agar program vaksinasi Covid-19 terlaksana secara maksimal. Karenanya, berbagai terobosan kreatif dimunculkan polres jajaran agar masyarakat tertarik untuk ikut

serta dalam kegiatan vaksinasi. Iqbal mengimbau agar masyarakat memanfaatkan momentum vaksinasi di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan vaksin tahap satu hingga level booster. Salah satu alasannya, karena pemerintah membuka kelonggaran bagi masyarakat untuk melakukan mudik dengan sejumlah persyaratan ketat termasuk ketentuan terkait vaksinasi.

"Untuk aturan mudik secara lengkap bisa diakses di laman internet. Namun yang pasti, protokol kesehatan harus tetap dijaga ketat. Kami imbau masyarakat juga mematuhi aturan lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan agar mudik nanti berjalan lancar," kata Iqbal. (Cry)

## Pedagang Musiman Belum Diizinkan Berlebaran

**SALATIGA (KR)** - Walikota Salatiga Yuliyanto belum mengizinkan pedagang mremo (musiman) berjualan di Jalan Jenderal Sudirman (Jensud) Salatiga. Larangan tersebut karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid 19. "Untuk budaya mremo menjelang Lebaran di Salatiga masih belum diperbolehkan karena masih pandemi Covid-19," kata Yuliyanto dihubungi KR, Minggu (10/4). Dijelaskan mremo akan mengundang kerumunan massa sehingga dikhawatirkan kelemahan dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Saat ini Salatiga masih berstatus PPKM level 2 dan harus

hati-hati. "Sementara mremo ditiadakan biar benar-benar aman," tandas Yuliyanto.

Diketahui mremo adalah budaya yang sudah digelar Pemkot Salatiga setiap menjelang Lebaran mulai H-7 hingga H+7. Pedagang yang sebagian besar warga sekitar pusat perdagangan biasa membuka lapak jualan makanan di bahu jalan Jensud Salatiga. Jumlah mereka mencapai ratusan dan meramaikan jelang Lebaran untuk mengais rezeki selama 14 hari. Mremo sementara ditiadakan sejak dua tahun ini karena pandemi Covid 19. Belum ada pemberitahuan dari Dinas Perdagangan untuk tahun 2022 ini. (Sus)

## Unperba dan UT Tukar Nota Kesepahaman

**PURBALINGGA (KR)** - Pertukaran Nota Kesepahaman antara Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) dilakukan secara daring di Kantor Ketua MPR Jakarta, Jumat (8/4). Dalam sambutannya secara daring seremonialnya dari UTCC, Rektor UT Prof Ojat Darajat MBUS PhD menyampaikan bahwa UT menyelenggarakan kerja sama dengan para pihak lain baik dalam penyelenggaraan akademik maupun operasional. UT dibesarkan melalui ke mitraan melalui resource sharing untuk efisiensi biaya penyelenggaraannya.

"Jumlah mahasiswa dan jumlah alumni yang sangat besar, meningkatkan layanan secara masif. Dalam suasana pandemi semua perguruan tinggi diselenggarakan secara virtual, untuk itu UT hadir menjembatani dengan membantu masyarakat dan mahasiswa untuk mengakses bahan ajar virtual. Penguatan grand design dalam jaringan baik secara sinkronus dan asinkronus, didukung oleh UT," ujar Ojat.

Rektor Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) Dr Teguh Djuharyanto MP mengucapkan terima kasih atas terjalannya kerja sama pengembangan penyelenggaraan pendidikan secara online. Unperba siap menyediakan ruang-ruang untuk memfasilitasi bagi penyelenggaraan tutorial tatap muka UT ke depannya. Semoga ke depan MoU bisa ditindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang meliputi bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT).

Hadir pula secara daring dari kantor Ketua MPR H Bambang Soesatyo SE MBA, selaku Ketua Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga. Bambang, nota kesepahaman antara Unperba dan UT sangat penting dalam kerja sama penyelenggaraan Tri Dharma PT. Menyambut baik dan apresiasi Nota Kesepahaman sebagai wujud kontribusi membangun ekosistem PT yang maju dan berkualitas. Proyeksi kerja sama UT dengan Unperba karena kesamaan visi, yang sama-sama berwawasan global namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal, serta menjunjung tinggi untuk peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Kiprah PT yaitu sebagai institusi primer pence-

hak sumberdaya yang berkualitas. PT adalah tumpuan bagi bangsa. Berdasarkan Statistik Pendidikan 2021, data tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Pada tahun 2021, penduduk yang tamat SMA/Sederajat baru sebesar 29,21 persen, dan yang tamat Perguruan Tinggi hanya sebesar 9,67 persen. Dari gambaran statistik tersebut menunjukkan masih banyak yang harus diupayakan, yaitu peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan pemerataan akses pendidikan tinggi yang harus menjangkau dan dapat diakses sebesar-besarnya oleh masyarakat, termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu.

Bambang menambahkan masyarakat berhak mendapatkan keadilan mengenyam pendidikan yang diatur dalam konstitusi. Sinergi dan kolaborasi sebagai sarana mewujudkan implementasi konsep merdeka belajar dimana PT terbebas dari bentuk belenggu keterbatasan, baik batasan waktu, jarak, dan lainnya. Pendidikan harus terbuka seluas-luasnya pada masyarakat. Di era disrupsi teknologi saat ini, pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi media yang mendobrak hambatan pendidikan. Batasan jarak, ruang, dan waktu menjadi tidak jadi persoalan, yang dibuktikan oleh pengajar dan pengelola UT. Sebagai PT yang telah lama berdiri (37 tahun) dengan mengedepankan sistem terbuka dan jarak jauh, banyak pengalaman yang didapatkan oleh PT yang belum lama termasuk Unperba. Disampaikan oleh Bapak Ketua MPR, Unperba harus bisa menjadi siswa dari UT yang sudah pionir di bidang PJJ. Konsep merdeka belajar melandasi nota kesepahaman dari bidang lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan layanan dan akses pendidikan yaitu dalam menghasilkan alumni yang berkualitas dan memiliki daya saing global.

Selain itu para pejabat di lingkup UT yang hadir secara luring diantaranya Rahmat Budiman MHum PhD. (Warek Pusat Pengembangan Institusi dan Kerja sama), Prof Dr Karnedi MA (Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Padang), Dr Milwan MSi (Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan UT), Dr Subekti Nurmatwi MSi. (Ati)

## SETAHUN SRI-BAMBANG PIMPIN GROBOGAN (1) Masa Pandemi Covid-19, PAD Capai Rp 424,2 M

**BULAN** April 2022, genap satu tahun Hj Sri Sumarni SH MM dan dr Bambang Pujiyanto MKes memimpin Kabupaten Grobogan. Banyak kendala yang dihadapi, terlebih masa pandemi Covid-19, yang berdampak pada aktivitas beberapa sektor usaha. Hal ini karena akibat pembatasan aktivitas dan penerapan pembatasan jarak antar manusia (physical distancing). Beberapa sektor ekonomi yang terpengaruh oleh Covid-19 antara lain sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, industri, usaha kecil dan menengah, serta investasi.

Meski terjadi penurunan aktivitas ekonomi tersebut, bukan berarti mempengaruhi pendapatan daerah yang diraih Kabupaten Grobogan. Selama tahun 2021, berhasil meraih pendapatan Rp 2,6 triliun lebih dari target Rp 2,5 triliun. iAda kenaikan pendapatan daerah sebesar 2,74 % atau Rp 70,2 miliar lebih. Hal yang mengembirakan kenaikan tersebut sebanyak Rp 424,2 miliar lebih di antaranya diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2020, PAD Grobogan hanya mendapat Rp 349,9 miliar," ujar Sri Sumarni didampingi Wabup dr Bambang Pujiyanto MKes dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prot-

kompim) Drs Mudzakir Walad MT, Jumat (8/4).

Keberhasilan tersebut di luar perkiraan, karena pada tahun 2021, hampir seluruh sektor usaha nyaris lumpuh dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, terutama pada puncak pandemi Covid-19 pertengahan tahun 2021. Di mana pada periode itu, status PPKM Kabupaten Grobogan masuk level 4. Disebutkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp 2,6 triliun lebih tersebut, rinciannya diperoleh dari PAD 16,10 % atau Rp 424,2 miliar lebih, pendapatan transfer 78,14 % atau Rp 2 triliun lebih, dan pendapatan asli daerah yang diraih Kabupaten Grobogan sebesar Rp 151,7 miliar lebih.

Sedangkan penggunaan untuk belanja daerah yang ditarik Rp 2,5 triliun, terealisasi Rp 2,4 triliun atau sekitar 93 %. Ini berarti ada penghematan anggaran sebesar sekitar 6,3 % atau Rp 165,7 miliar lebih.

Belanja daerah sebesar itu digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp 1,7 triliun, atau sekitar 70 %, belanja modal Rp 29 miliar atau sekitar 11 %, belanja transfer Rp 422,1 miliar atau sekitar 17 %, dan digunakan untuk belanja tidak terduga sebesar Rp 12,6 miliar atau 0,5 % dari total realisasi belanja daerah.

Hal lain yang mengembirakan, adalah masalah angka kemiskinan. Meski mengalami kenaikan, tetapi angkanya tipis. Dari 12,46 persen pada 2020 menjadi 12,74 persen di 2021. Data tersebut setara dengan 172.260 orang pada 2020 dan 175.720 orang di 2021. Jika melihat data tujuh tahun ke belakang, angka kemiskinan terendah terjadi pada 2019, yakni 11,77 persen atau 161.920 orang. Namun, pada dua tahun berikutnya, angka ke-

miskinan langsung merangkak naik akibat adanya pandemi Covid-19 yang datang yang menyerang seluruh lapis kehidupan sejak awal 2020 lalu. iJika pandemi Covid-19 bisa turun terus, Pemerintah Kabupaten Grobogan menargetkan angka kemiskinan bisa turun menjadi 11,5 persen pada akhir tahun 2022 ini, i ujar Sri Sumarni.

Untuk mencapai target penurunan tersebut, pihaknya merancang program pemulihan ekonomi pascapandemi. Yakni dengan menggerakkan perekonomian masyarakat, utamanya UMKM. Selain itu, pertanyaan dan koperasi juga menjadi target program pemulihan ekonomi. Kemudian juga kuliner dan pariwisata. Objek pemulihan ekonomi itu akan didongkrak di tahun 2022 ini.

"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, ada 10 program unggulan daerah yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut di antaranya adalah pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan," tambah Sri Sumarni. (M Taslim)



KR-M Taslim

Hj Sri Sumarni SH MM



KR-M Taslim

Dr Bambang Pujiyanto MKes